

KOMUNIKASI POLITIK GIBRAN RAKABUMING RAKA DALAM MEMPERJUANGKAN KEPUTUSAN DPP PDI PERJUANGAN SEBAGAI CALON WALIKOTA SOLO (ANALISA PERSPEKTIF TEORI JÜRGEN HABERMAS)

Yohanes Frenky dan A.Rahman

Universitas Mercu Buana

frenkyohanes12@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi politik Gibran Rakabuming Raka dalam memperjuangkan keputusan DPP PDI Perjuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma kritis dengan analisis perspektif teori tindakan komunikatif dari Jürgen Habermas. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen, laporan serta studi literatur dari buku, jurnal, media massa dan hasil penelitian terdahulu. Adapun informan dalam penelitian ini yakni Gibran Rakabuming Raka dan PDI Perjuangan dari tingkat DPC Solo, DPD Jawa Tengah serta DPP. Hasil dari penelitian ini yaitu Gibran Rakabuming Raka membangun pola komunikasi politik dari atas ke bawah melalui konsultasi dengan DPP PDI Perjuangan. Pola komunikasi tersebut menguntungkan Gibran Rakabuming Raka dikarenakan DPP PDI Perjuangan menerapkan komunikasi monologis terhadap DPC PDI Perjuangan Solo dan Achmad Purnomo. Pendekatan elitis yang dijalankan oleh Gibran Rakabuming Raka tidak menunjukkan communication rational action sesuai dengan pandangan Jürgen Habermas tetapi lebih kepada purposive rational action. Sementara itu, citra milenial dan persepsi anak presiden memberikan kemudahan bagi Gibran Rakabuming Raka, apalagi Presiden Joko Widodo adalah kader PDI Perjuangan sehingga konsensus dalam rekomendasi pencalonan tidak merepresentasikan komunikasi dialogis.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Teori Tindakan Komunikatif, Pemilihan Walikota.

Abstract. This study aims to analyze Gibran Rakabuming Raka's political communication in fighting for the decision of the PDI Perjuangan DPP. This research uses a qualitative approach with a case study method. The paradigm in this study is the critical paradigm with the perspective analysis of communicative action theory from Jürgen Habermas. In this study, the authors collect data from various sources. The research data consists of primary data and secondary data. Primary data is in the form of interviews and secondary data is in the form of documents, reports and literature studies from books, journals, mass media and the results of previous research. The informants in this study were Gibran Rakabuming Raka and PDI Perjuangan from the Solo DPC, Central Java DPD and DPP levels. The result of this study is that Gibran Rakabuming Raka built a pattern of political communication from top to bottom through consultation with the PDI Perjuangan DPP. This communication pattern benefited Gibran Rakabuming Raka because the PDI Perjuangan DPP implemented monological communication with the PDI Perjuangan DPC Solo and Achmad Purnomo. The elitist approach applied by Gibran Rakabuming Raka does not show communication of rational action according to Jürgen Habermas' view but rather purposive rational action. Meanwhile, the millennial image and perception of the president's child make it easy for Gibran Rakabuming Raka, especially since President Joko Widodo is a PDI Perjuangan cadre so that the context in the nomination recommendation does not represent dialogic communication.

Keywords: Political Communication, Communicative Action Theory, Mayor Election.

PENDAHULUAN

Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Solo memunculkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota yang diusung oleh PDI Perjuangan. Keputusan ini menimbulkan dinamika politik di internal partai. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak merepresentasikan PDI Perjuangan sebagai partai kader. Pasalnya keanggotaan partai yang baru dan belum memenuhi persyaratan 3 tahun keanggotaan untuk dicalonkan. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Solo sejak awal telah mencalonkan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosasebagai bakal calon wali kota dan wakil wali

kota Solo. Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil rekrutmen dan penjangkaran tertutup yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Solo, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan partai. Bahkan, nama Achmad Purnomodan Teguh Prakosusudah diserahkan ke DPP PDI Perjuangan.

Menurut Achmad Purnomo (Putri & Wibowo, 2020) pendaftaran di DPC PDI Perjuangan Solo sudah ditutup ketika Gibran Rakabuming Rakamendaftar. Gibran Rakabuming Raka baru mengambil formulir pendaftaran keanggotaan partai dan sekaligus formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah di DPC PDI Perjuangan Solo pada 23 September 2019 (Putri & Wibowo, 2020). Dalam kaderisasi partai, PDI Perjuangan mensyaratkan keanggotaan partai minimal tiga tahun bagi kader untuk bisa dicalonkan. Hal tersebut berbeda dengan keanggotaan Gibran Rakabuming Raka yang baru mendapat Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan sejak 23 September 2019. Fenomena ini menjadi realitas politik yang menarik, terlebih setelah mundurnya Achmad Purnomo dalam bursa calon wali kota Solo. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka oleh PDI Perjuangan pada pilkada Solo tahun 2020 menjadi sorotan. Pasalnya sebagai anak presiden tentunya Gibran Rakabuming Raka memiliki modal politik yang besar. Apalagi Presiden Joko Widodo merupakan bagian dari PDI Perjuangan sehingga sangat mudah bagi Gibran Rakabuming Raka mengantongi rekomendasi DPP PDI Perjuangan ketimbang Achmad Purnomo. Disisi lain Gibran Rakabuming Raka juga terhitung sebagai anggota baru partai dengan pengalaman politik (Rizal & Hardiyanto, 2020). Keanggotaan Gibran Rakabuming Raka belum memenuhi persyaratan yang diamanatkan partai untuk dapat dicalonkan. Hal tersebut juga memberikan kesan negatif terhadap kader-kader PDI Perjuangan lainnya yakni adanya special treatment.

Dinamika politik ini dalam sudut pandang komunikasi politik menjadi suatu fenomena. Sebagai partai kader, PDI Perjuangan akan secara selektif dalam menentukan keputusan pencalonan. Hal tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa Solo adalah basis kuat PDI Perjuangan, artinya tanpa sosok Gibran Rakabuming Raka partai ini tetap bisa menang (Rizal & Hardiyanto, 2020). Komunikasi politik menjadi modal bagi kandidat untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan. Menurut Gabriel A. Almond, komunikasi politik diumpamakan sebagai peredaran darah dan digambarkan sebagai media yang digunakan oleh fungsi-fungsi lainnya dalam sistem politik (Varma, 2007). Komunikasi politik menjadi jembatan penghubung antara kandidat dan partai politik pengusung.

Dalam komunikasi politik ada tindakan komunikasi yang dijalankan oleh aktor politik. Tindakan komunikasi tersebut menurut Habermas mengacu pada tindakan yang diarahkan oleh norma-norma yang disepakati bersama berdasarkan harapan timbal balik diantara subjek-subjek yang berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, khususnya bahasa sehari-hari sebagai medium bagi tindakan tersebut (Setyowati, 2016). Tindakan komunikatif mengarahkan diri pada konsensus. Artinya setiap tindakan menjadi tindakan rasional yang berorientasi kepada kesepahaman, persetujuan dan rasa saling mengerti. Dalam melakukan komunikasi terdapat rasionalitas sebagai sebuah bentuk tindakan komunikasi yang diorientasikan untuk mencapai kesepakatan atau konsensus dengan orang lain. Rasionalitas merupakan inti dari manusia komunikatif yang menciptakan interaksi.

Jürgen Habermas mensyaratkan bahasa sebagai media untuk mencapai pemahaman (understanding) selama para partisipan melalui bahasa tersebut berelasi pada dunia secara timbal balik akan menciptakan klaim validitas yang dapat diterima atau dipertentangkan satu sama lain (Tobing, 2017). Klaim validitas tersebut yakni klaim kebenaran, klaim ketepatan, klaim kejujuran dan klaim komprehensibilitas. Dalam proses komunikasi politik yang terencana, klaim validitas mengarah pada konsensus. Konsensus akan menjelang pemilihan wali kotamengarah pada hubungan dengan paling sedikit dua objek. Kehadiran objek tersebut mampu berbicara dan bertindak yang membentuk hubungan interpersonal (baik dalam arti verbal maupun nonverbal). Hubungan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan pencalonan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis “Komunikasi Politik Gibran Rakabuming Raka dalam Memperjuangkan Keputusan DPP PDI Perjuangan sebagai Calon Wali kota Solo (Analisis Perspektif Teori Jürgen Habermas)”.

KAJIAN TEORI

Teori Tindakan Komunikatif. Teori tindakan komunikatif mempunyai distingsi yang jelas mengenai ranah kehidupan praksis. Praksis disini bermakna tindakan manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya didasarkan pada kesadaran rasio (Daryono, 2016). Teori tindakan komunikatif dipelopori oleh Jürgen Habermas yang merupakan tokoh filsafat kritis. Ciri khas dari filsafat kritisnya berkaitan dengan kritik terhadap hubungan-hubungan sosial. Pemikiran Habermas merefleksikan masyarakat serta diri dalam

konteks dialektika struktur-struktur sosial dan emansipasi. Menurut Habermas (Fitriyah et al., 2019) secara konseptual ada empat model tindakan yakni Tindakan teologis (terkait dengan dunia objektif), Tindakan yang diatur secara normatif (terkait dengan dunia subjektif), Tindakan dramaturgis (terkait dengan dunia subjektif dan objektif), dan Tindakan komunikatif.

Tindakan teologis mengorientasikan diri pada tujuan dari setiap keputusan dengan memanfaatkan sarana secara tepat. Tindakan ini bergerak dengan model bawah (subjek atau aktor) menuju ke atas (kesepakatan yang akan dijalin bersama) yang kemudian diperluas menjadi model tindakan strategis dengan argumen bahwa proses pemanfaatan sarana dan langkah-langkah yang tepat tersebut diambil untuk mencapai tujuan bersama. Tindakan normatif bergerak dengan model dari atas ke bawah dengan aktor diharapkan berperilaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan mengorientasikan tindakannya kepada nilai-nilai bersama. Konteks normatif menjadi dasar interaksi dalam totalitas relasi antarpribadi, artinya aktor-aktor selain berelasi terhadap keadaan situasinya secara bersamaan juga berelasi dengan dunia sosial.

Tindakan dramaturgis, aktor mengungkapkan citra tertentu untuk membangun kesan tentang dirinya sendiri dengan mengungkapkan sisi subjektivitasnya. Model dalam tindakan ini digunakan dalam deksripsi interaksi yang diorientasikan secara fenomenologis. Dalam tindakan dramaturgi, tindakan sosial diartikan sebagai perjumpaan partisipan dalam membentuk sesuatu yang bersifat publik yang dapat diperlihatkan dan saling ditampilkan. Tindakan komunikatif adalah tindakan yang menjadi dasar dalam penelitian ini yakni mengarah pada interaksi dua orang subjek atau lebih dalam berbicara, bertindak dengan tujuan membangun hubungan antar personal. Subjek berusaha mencapai dan mengkoordinasikan pemahaman mengenai situasi dan rencana tindakan melalui kesepakatan. Masing-masing subjek kemudian melakukan interpretasi definisi-situasi demi terwujudnya konsensus.

Tindakan komunikatif menurut Habermas (Setyowati, 2016) mengacu pada tindakan yang diarahkan oleh norma yang disepakati bersama berdasarkan harapan timbal balik di antara subjek yang berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, khususnya bahasa sehari-hari. Tolok ukur keberhasilan bukan lagi didasarkan pada upaya pemenuhan satu sisi akan tetapi hasil yang dituju lebih berorientasi pada pemahaman timbal balik antara partisipan komunikasi. Komunikasi menjadi titik tolak dalam teori ini, dan praksis menjadi konsep sentralnya. Praksis bukan diartikan sebagai tingkah laku buta berdasarkan naluri belaka, melainkan tindakan dasar manusia sebagai makhluk sosial yang diterangi oleh kesadaran rasional. Rasionalitas melahirkan tiga bidang otonom yaitu dunia objektif (kenyataan), dunia sosial (masyarakat) dan dunia subjektif (diri manusia).

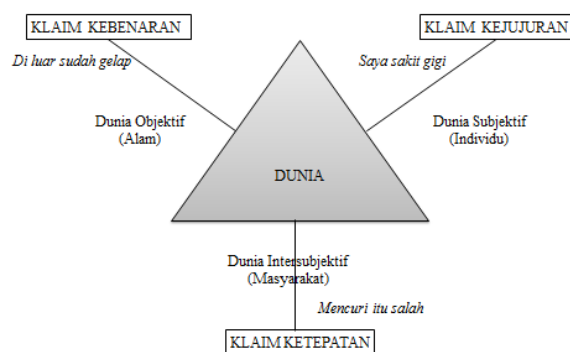
Habermas (Fitriyah et al., 2019) juga menekankan rasionalitas hanya ada dalam model tindakan komunikatif, karena tiga alasan: Pertama, dalam tindakan teologis, bahasa digunakan hanya sebagai media pembicara yang ingin mencapai keberhasilannya sendiri. Kedua, dalam tindakan normatif, bahasa digunakan sebagai media yang mentransmisikan nilai-nilai budaya dan membawakan suatu konsensus. Ketiga, dalam tindakan dramaturgis bahasa digunakan sebagai media presentasi diri. Sedangkan tindakan komunikatif mengutamakan bahasa sebagai media komunikasi bebas tekanan. Tindakan komunikatif menurut Habermas mensyaratkan bahasa sebagai media untuk mencapai pemahaman selama para partisipan berelasi pada dunia secara timbal balik akan menciptakan klaim validitas yang dapat diterima atau dipertentangkan (Tobing, 2017).

Pada model tindakan komunikatif, Habermas (Fitriyah et al., 2019) mengajukan beberapa model untuk memahami tindakan komunikatif. Pertama, masalah koordinasi tindakan. Sebelum terjadinya tindakan komunikatif, setiap orang membekali dirinya dengan pola tindakan sendiri, tercapainya pemahaman dalam bahasa direpresentasikan pada model subjek yang bertindak secara teologis, timbal balik dan saling mempengaruhi. Kedua, perbedaan ilokusioner dan proluksioner yang mempunyai orientasi kepada keberhasilan dan orientasi kepada tercapainya pemahaman. Untuk mencapai konsensus dalam tindakan komunikatif agar bisa melakukan klaim atas kebenaran objektif, Habermas (Tobing, 2017) memberikan analisis pada teori tindakan wicara (speech-act theory). Perbedaan efek illocutionary dan perlocutionary dipinjam oleh Habermas dari J.L. Austin.

Menurut Habermas (Tobing, 2017), J.L. Austin mengaplikasikan lokusi (locutionary) sebagai isi dari kalimat proposisional yang dinominalkan. Melalui tindakan lokusi, pembicara (speaker) menyatakan suatu keadaan; ia mengatakan sesuatu. Sedangkan pada tindakan ilokusi (illocutionary), pembicara melakukan peran yang menegakkan mode kalimat yang digunakan sebagai sebuah pernyataan, janji, perintah, sumpah atau menyukai. Akhirnya melalui tindakan perlokusi, pembicara memproduksi efek pada pendengar. Tiga tindakan yang dibedakan oleh Austin tersebut dapat dikategorikan sebagai frase: mengatakan sesuatu (to say something), untuk bertindak dalam mengatakan

sesuatu (to act in say something), memberikan tentang sesuatu melalui bertindak dalam mengatakan sesuatu (acting in saying something).

Ketiga, peran klaim validitas. Ada empat macam klaim tindakan komunikatif, yaitu klaim kebenaran (truth) yaitu kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif; klaim ketepatan (rightness) yaitu kesepakatan tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial; klaim autentisitas/ kejujuran (sincerity) yaitu kesepakatan tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang; dan klaim komprehensibilitas (comprehensibility). Setiap komunikasi yang efektif harus mencapai klaim keempat dan orang yang mampu berkomunikasi dalam arti menghasilkan klaim-klaim tersebut memiliki kompetensi komunikasi.



Gambar 1. Klaim-Klaim Habermas

(Fitriyah et al., 2019)

Untuk mencapai kesepakatan, subjek harus memiliki apa yang disebut sebagai kompetensi komunikasi yang terhubung dengan kemampuan dalam berbahasa. Tindakan komunikatif dalam mewujudkan keshahihan tidak hanya dapat diidentikan dengan kompetensi komunikasi saja, karena memang melibatkan moment kognitif, interaktif, dan ekspresif. Implikasinya, tindakan komunikatif yang dibangun harus mencerminkan klaim-klaim keshahihan. Habermas memahami bahwa rasionalitas berhubungan dengan tiga macam rasionalitas yang otonom, yaitu rasionalitas kognitif-instrumental, rasionalitas praktis-moral dan rasionalitas praktis-estetis. Jika kompleksitas hidup dirasionalisasikan, maka menghasilkan pengetahuan yang memiliki klaim keshahihan (validity claim) tertentu hingga dalam kompleksitas ini subjek dapat mencapai konsensus (Fitriyah et al., 2019).

Speech Act Theory. Tindak tutur (speech act) merupakan teori yang mengkaji tentang makna bahasa yang didasarkan pada hubungan antara tuturan dengan tindakan yang dilakukan penuturnya. Tindak tutur merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca serta apa yang dibicarakan. Bertutur dapat dikatakan sebagai aktivitas, karena hal tersebut kemungkinan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tuturan merupakan sarana utama komunikasi dan memiliki makna yang nyata dalam komunikasi, dengan bentuk ujaran yang melibatkan dua pihak dalam suatu kondisi tertentu. Tindak tutur memiliki maksud dan tujuan yang merujuk pada pengaruh atau aktivitas terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Dalam mengkaji tindak tutur secara pragmatik, dirumuskan dalam tiga jenis tindak tutur. Ketiga tindak tutur tersebut yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Tindak lokusi adalah tindakan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu. Tindak tutur lokusi merupakan the act of saying something yang mengutamakan isi tuturan yang disampaikan oleh penutur. Konsep tindak tutur lokusi memandang pada bentuk suatu ujaran. Bentuk tindakan lokusi dibedakan menjadi: (a) Pernyataan (Deklaratif) hanya untuk memberitahukan, sehingga dapat menaruh perhatian; (b) Pertanyaan (Interogatif) untuk menanyakan sesuatu kepada pendengar dan diharapkan memberikan jawaban tentang pertanyaan yang diutarakan; (c) Perintah (Imperatif) agar pendengar memberikan tanggapan yang berupa tindakan.

Tindak Ilokusi (Illocutionary Act) merupakan tindak tutur yang mengandung daya melakukan suatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Tindakan tersebut dapat berupa janji, tawaran atau pertanyaan dalam tuturan. Oleh karena itu, tindak tutur ilokusi ini disebut juga sebagai the act of doing something. Tindak tutur ilokusi merupakan bentuk ujaran yang memiliki fungsi untuk mengungkapkan dan memberikan informasi dalam suatu tindakan. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur nyata yang

dilakukan oleh tuturan seperti janji, sambutan dan peringatan. Dalam memahami tindak tutur, ilokusi merupakan bagian yang sangat penting. Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang diidentifikasi dengan kalimat-kalimat performatif. Tindak ilokusi digolongkan dalam aktifitas bertutur ke dalam lima bentuk tuturan yaitu, sebagai berikut: 1) Tindak tutur asertif adalah tindak tutur yang terkait dengan kebenaran atas hal yang dikatakan, 2) Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan agar lawan tutur melakukan sesuatu, 3) Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang terikat antara penuturnya dengan suatu tindakan yang dilakukan diwaktu yang akan datang dengan melakukan segala hal yang disebutkan pada tuturan, 4) Tindak tutur ekspresif adalah tuturan yang dilakukan agar tuturan diartikan sebagai evaluasi, dan 5) Tindak tutur deklaratif adalah tuturan yang mempunyai kekuasaan dalam tuturannya dan dengan maksud menciptakan hal baru.

Tindak Perlokusi adalah melakukan suatu tindakan dengan menyatakan sesuatu. Tindak perlokusi ini memiliki pengaruh terhadap mitra tutur yang mendengarkan tuturan. Akibat pengaruh tersebut, tanggapan dari mitra tutur tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga berupatindakan atau perbuatan. Tindak perlokusi disebut sebagai *the act of affective someone*. Tindak tutur perlokusi merupakan efek bagi yang mendengarkan.

Komunikasi Politik. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yakni *Communico* yang artinya membagi, dan *Communis* yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi oleh Gudykunst dan Kim (Nugroho, 2019) bahwa Pertama, komunikasi adalah aktifitas simbolik. Ini menyangkut pembentukan simbol dan interpretasinya. Kedua, komunikasi bukan hanya sebuah proses yang menyangkut transmisi pesan, akan tetapi juga interpretasi pesan. Ketiga, komunikasi melibatkan kreasi makna. Bahwa komunikasi sendiri adalah kegiatan memaknai, dimana makna menjadi sebuah entitas yang dipertukarkan dan dibentuk dalam setiap peristiwa komunikasi. Keempat, komunikasi berlangsung dalam tingkat kesadaran yang berbeda. Banyak tindakan komunikasi kita dilakukan secara tidak sadar karena sudah terbiasa, sehingga komunikasi memiliki bentuk-bentuk dan derajat-derajat dalam konteks perbedaan kesadaran dalam berkomunikasi. Kelima, komunikasi membuat prediksi pada *out come*. Manusia selalu membangun suatu prediksi tentang orang lain dalam komunikasinya. Keenam, niat atau intense bukanlah suatu kondisi yang harus ada dalam komunikasi. Ketujuh, setiap pesan komunikasi memiliki dimensi konteks dan dimensi hubungan. Dimensi konteks adalah apa yang dikatakannya, dimensi hubungan menyangkut bagaimana itu dikatakan. Kedelapan, komunikator menerapkan sebuah struktur dalam interaksi, dimana setiap komunikasi menggunakan aturan tertentu.

Komunikasi memiliki tujuan yakni sebagai suatu usaha untuk mempengaruhi tingkah laku sasaran atau tujuan komunikasi (penerima pesan), (Severin & Tankard, 2011). Dalam komunikasi seseorang individu atau kelompok menetapkan pola berkomunikasi. Pola komunikasi menurut Aldo de Moor dan Hans Welgand adalah elemen-elemen kunci yang menjamin terwujud dan bekerjanya norma-norma komunikasi dalam suatu masyarakat. Norma komunikasi adalah seperangkat tindakan komunikatif yang mungkin, harus, atau tidak boleh dilakukan oleh aktor dalam alur kerja yang komunikatif (Rizka & Syam, 2018). Pola komunikasi dapat dikatakan sebagai representasi simbolik atau gambaran visual dari suatu peristiwa komunikasi. Berdasarkan definisi pola komunikasi tersebut, pola komunikasi politik dapat dibaca sebagai model komunikasi politik yakni meta-norma yang menentukan keterlibatan aktor dan konstruksi informasi politik yang dapat mempengaruhi konstelasi kekuasaan antara politisi, media dan publik. Pola komunikasi politik dipengaruhi oleh karakteristik sistem politik dalam suatu komunitas masyarakat dan karakteristik medium komunikasi yang digunakan. Pola komunikasi politik menggambarkan suatu bentuk komunikasi yang terjadi antar pelaku politik (Rizka & Syam, 2018). Melalui pola komunikasi tertentu maka terjalin komunikasi politik yang sesuai dengan kebutuhan komunikator politik.

Menurut Dahlan (Cangara, 2016) komunikasi politik adalah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Selanjutnya Cangara dalam (Santi, 2018) mengartikan komunikasi politik sebagai proses komunikasi dan memiliki implikasi terhadap aktivitas-aktivitas politik. Komunikasi politik mempunyai pesan yang bermuatan politik dan berorientasi kekuasaan. Untuk menghindari komunikasi politik tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, Doris Garber (Santi, 2018) menyatakan dalam tulisannya *Political Language* (1981) jika komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi juga mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh dan tindakan-tindakan politik seperti boikot, protes dan unjuk rasa. Komunikasi politik dirumuskan sebagai proses pengoperan simbol-

simbol komunikasi yang berisi pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain, dengan tujuan membuka wawasan atau cara berpikir serta memengaruhi tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. Komunikasi politik sebagai *body of knowledge* terdiri atas berbagai unsur yakni sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek (Cangara, 2016).

- a) Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi politik.
- b) Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, verbal maupun non verbal.
- c) Saluran atau media politik merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya.
- d) Sasaran atau target politik adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan.
- e) Efek komunikasi yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai politik dan bermuara pada pemberian suara dalam pemilu.

McNair (Cangara, 2016) menjelaskan komunikasi politik memiliki lima fungsi dasar yakni: Pertama, memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi disekitarnya. Kedua, mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Ketiga, menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat. Keempat, membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Kelima, dalam masyarakat yang demokrasi, maka media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dalam program lembaga politik dapat tersalurkan kepada media massa. Dalam komunikasi politik, aktor politik memainkan beragam strategi guna tercapainya tujuan politis. Menurut Effendy (Alhidayah, 2020), strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis.

Politisi. Politisi merupakan aktor penting dalam sistem politik Indonesia, sehingga perilaku politisi akan mencerminkan bagaimana sistem dan budaya politik Indonesia. Politisi juga dapat diartikan sebagai orang yang mempelajari, menekuni, mempraktekkan perilaku-perilaku di dalam politik. Daniel Katz (Nimmo, 2000) membedakan politisi ke dalam dua hal yang berbeda berkenaan dengan sumber perjuangan kepentingan politisi pada proses politik, yaitu politisi ideolog (*negarawan*); serta politisi partisan. Politisi ideolog adalah orang-orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan bersama atau publik. Sedangkan politisi partisan adalah orang-orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kelompoknya.

Menurut Geddes (Savirani, 2007), penentuan struktur individual politisi disesuaikan dengan institusi yang didiaminya. Oleh karena itu, politisi eksekutif di daerah, strategi untuk mencapai popularitas mungkin harus ditempuh dengan melakukan penerobosan terhadap struktur birokrasi yang kaku dan tidak fleksibel. Dalam aktivitas politik, setiap politisi memerlukan modal sosial dan dukungan politis dalam sebuah kompetisi, termasuk kompetisi politik. Ronald S. Burt memberikan catatan bahwa dalam arena atau iklim kompetisi (baik kompetisi ekonomi ataupun politik), seorang politisi setidaknya harus memiliki tiga modal atau *capital* yaitu modal finansial berupa uang atau modal material lainnya; modal manusiaberupa kualitas seseorang seperti kecerdasan, ketrampilan, penampilan, kharisma; dan modal sosial berupa hubungan dengan teman, kolega atau orang tertentu (Dewi et al., 2018). Melalui elaborasi Lin dan Burt maka politisi dalam menembus elit partai politik sebagai kandidat pada pemilihan umum memfokuskan pada modal apa saja yang dimiliki secara personal (latar belakang keluarga, pendidikan, kemampuan ekonomi, riwayat karir politik, motivasi) yang kemudian membuat mereka dicalonkan.

Partai Politik. Pada umumnya banyak ahli telah membuat batasan tentang partai politik. Misalnya Carl J. Friedrich (Sulaeman, 2015) yang mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota-anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta material. Partai politik sesungguhnya adalah suatu organisasi yang memiliki ideologi dan berupaya mencari dukungan masyarakat melalui berbagai strategi politik guna menempatkan aktornya dalam jabatan tertentu. Partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan meliputi seleksi calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi

pemerintahan (Surbakti, 2010). Dalam seleksi kandidat, para calon yang dinominasikan memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik partai politik yang bersangkutan. Seleksi calon atau rekrutmen politik adalah mencari anggota baru untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak sebatas hanya untuk mencari anggota baru, tetapi juga merekrut dan mencalonkan anggota partai untuk posisi jabatan publik.

Dalam rekrutmen politik sejatinya menunjukkan tipologi partai, baik sebagai partai massa, kader, catch-all, kartel atau business-firm yang dilihat dari bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai (Fitriyah, 2020). Rekrutmen politik untuk pemilu diselenggarakan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap sertifikasi, adalah tahap pendefinisian kriteria siapa yang dapat masuk dalam pencalonan, meliputi aturan pemilu, aturan partai, dan norma-norma sosial. Kedua, tahap penominasian, mencakup ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi saat memutuskan siapa yang dinominasikan; Ketiga, tahap pemilu, yakni tahap yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Tahap pertama dan kedua dari proses rekrutmen politik adalah domain penuh partai politik. Setelahnya, tahap ketiga adalah domain pemilih, yakni proses di mana pemilih menentukan siapa yang akan dipilih.

Hazan dan Rahat menyebutkan empat hal penting dalam rekrutmen politik oleh partai politik, yakni: Pertama, siapa yang dapat dinominasikan sebagai calon; Kedua, siapa yang melakukan seleksi calon; Ketiga, di mana calon diseleksi dan; Keempat, bagaimana calon diputuskan (Fitriyah, 2020). Berdasarkan empat hal tersebut menghasilkan model pengelolaan rekrutmen partai apakah inklusif atau eksklusif dan sentralistik atau desentralistik. Soal siapa yang dicalonkan, ada dua pola sistem seleksi kandidat yakni inklusif bagi siapapun dapat mencalonkan melalui partai politik dengan memenuhi syarat ringan dan eksklusif jika terdapat syarat yang ketat sehingga membatasi orang untuk ikut serta dalam seleksi kandidat. Tersentralisasi jika seleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai tingkat nasional dan sebaliknya jika oleh partai cabang. Rekrutmen tertutup jika elit partai politik diberi hak penuh untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan sebagai calon. Selanjutnya prosesnya disebut informal jika tidak ada standar norma yang dibakukan atau prosesnya formal jika ada standarisasi prosedur yang dibakukan dan eksplisit. Karakter inklusif, desentralisasi, dan formal menunjuk pada ukuran rekrutmen politik yang demokratis, dan jika sebaliknya disebut tidak demokratis.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dan teori tindakan komunikatif dari Jurgen Habermas untuk menganalisis komunikasi politik Gibran Rakabuming Raka dalam memperjuangkan keputusan DPP PDI Perjuangan. Informan dalam penelitian ini adalah Gibran Rakabuming Raka dan internal PDI Perjuangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penetapan Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mempunyai aturan tersendiri khususnya dalam mekanisme rekrutmen politik di internal partai. Mekanisme tersebut sudah tertata dan baku yang tertuang di dalam AD/ART partai. Artinya tidak boleh menyimpang dari aturan partai, di mana keputusan tertinggi adalah putusan hasil kongres partai, keputusan Dewan Pimpinan Partai, keputusan Dewan Pimpinan Daerah dan keputusan Dewan Pimpinan Cabang. Dalam AD/ART PDI Perjuangan tertuang mekanisme rekrutmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP yang diatur dalam SK No. 424/KPTS/DPP/X/2009 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebagai penyempurnaan dari Surat Keputusan sebelumnya No.024/KPTS/DPP/VII/2005 (Perjuangan, n.d.). Secara umum sebagai berikut:

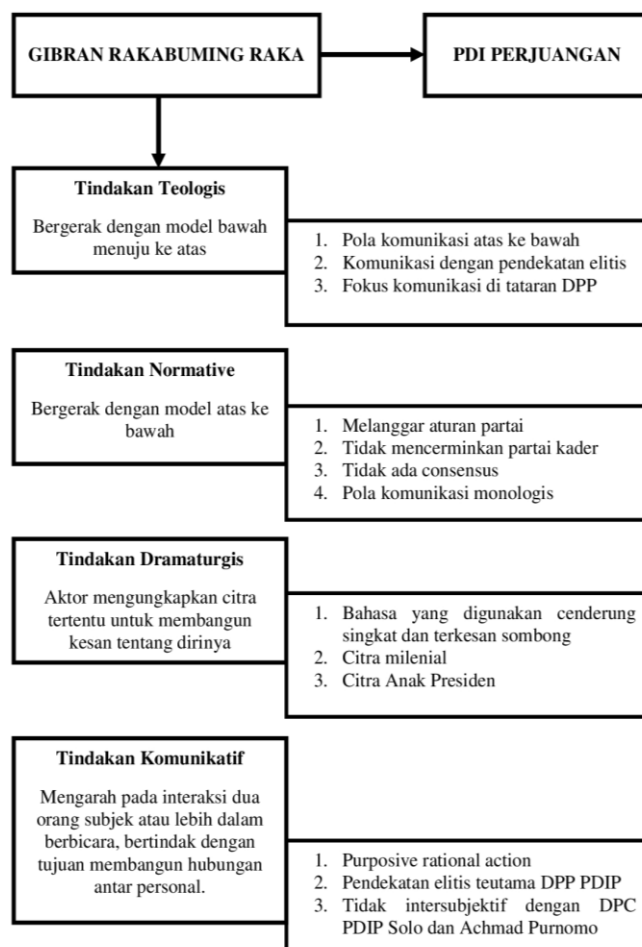
1. Penjaringan dalam pasal 3 ayat 2 dilakukan dengan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat baik dari perorangan maupun kelompok masyarakat melalui struktural partai di bawah DPP Partai. Penjaringan dilakukan kebawah yang dilakukan mulai suara dari perwakilan warga di tingkat RW atau Pengurus Anak Ranting.
2. Proses verifikasi dijelaskan dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “Verifikasi adalah penelitian terhadap seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan

- Wakil Wali kota, berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No 32 tahun 2004 dan dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh DPD dan DPC partai, sebelum pelaksanaan Rakercabsus. Tim verifikasi dalam pasal 6 ayat 2 terdiri dari: 2 orang dari unsur DPD yang ditetapkan melalui rapat DPD Partai, dan 3 orang dari unsur DPC yang ditetapkan melalui rapat DPC Partai
3. Penyaringan adalah seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota setelah dilakukan verifikasi dan dilakukan melalui mekanisme Rakercabsus Partai (Rapat Kerja Cabang Khusus) seperti pada pasal 1 ayat 6. Ketentuan Rakercabsus pada pasal 7 adalah sebagai berikut: Rakercabsus diselenggarakan oleh DPC Partai; Rakercabsus dipimpin oleh DPP Partai atau DPD Partai yang telah diberi mandat oleh DPP Partai; Peserta Rakercabsus adalah ketua dan sekretaris Ranting, seluruh Pengurus PAC partai dan Seluruh DPC Partai; Di dalam forum Rakercabsus, seluruh peserta Rakercabsus memiliki hak bicara dan hak suara yang sama; Setiap orang peserta Rakercabsus memiliki satu suara; Pemilihan Bakal Calon dilakukan dengan musyawarah mufakat atau dengan cara pemungutan suara secara tertutup
 4. Hasil dari Rakercabsus dibawa ke DPD partai untuk dirapatkan dalam rapat internal DPD partai. Yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh setengah dari pengurus DPD untuk membahas proses pencalonan Kepala Daerah di wilayahnya yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 10. Dan DPD partai berhak untuk mengurangi nama bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan ke DPP
 5. DPP menerima usulan pasangan bakal calon kepala daerah, dan mengadakan seleksi dengan fit and propertest. Setelah itu menurut pasal 1 ayat 8, penentuan bakal calon ditetapkan oleh DPP Partai melalui Rapat DPP Partai untuk menentukan dan menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah itu pada pasal 4 ayat 14 DPP memberikan rekomendasi pasangan calon kepala daerah yang dikirimkan kepada DPD dan DPC. Untuk selanjutnya DPC wajib mendaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota. Dalam pasal 4 ayat 13 dijelaskan bahwa "Dalam menetapkan calon yang akan direkomendasi, DPP Partai dapat menetapkan calon berdasarkan nama-nama calon hasil Rakercabsus dan dalam keadaan luar biasa dapat menentukan calon di luar hasil Rakercabsus.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 87 tentang Kaderisasi Partai secara jelas menyebutkan bahwa kaderisasi berjenjang diterapkan oleh PDI Perjuangan. Kaderisasi berjenjang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pendidikan kader tingkat pertama, dilaksanakan oleh DPC partai dan melaporkannya pada DPD partai, 2) Pendidikan kader tingkat madya, dilaksanakan oleh DPD partai dan melaporkannya pada DPP partai, 3) Pendidikan kader tingkat utama, dilaksanakan oleh DPP partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga pada tahapan akhir keputusan untuk menentukan bakal calon yang akan dicalonkan oleh partai dipercayakan kepada ketua umum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarnoputri.

Komunikasi Politik. Komunikasi politik dianalisis menggunakan teori tindakan komunikatif guna mengelompokkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis. Komunikasi politik merupakan aktivitas simbolik dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Komunikasi memiliki tujuan yakni sebagai suatu usaha untuk mempengaruhi tingkah laku sasaran atau tujuan komunikasi (penerima pesan), (Severin & Tankard, 2011). Dalam komunikasi, seseorang individu atau kelompok menetapkan pola berkomunikasi. Pola komunikasi dipengaruhi oleh karakteristik sebuah komunitas, medium komunikasi yang digunakan, maupun format pesan yang dibentuk. Menurut pandangan Habermas dalam (Fitriyah et al., 2019) secara konseptual ada empat model tindakan yakni tindakan teologis, tindakan normative, tindakan dramaturgis, dan tindakan komunikatif.

Berkaitan dengan komunikasi politik yang dibangun oleh Gibran Rakabuming Raka dalam memperjuangkan keputusan DPP PDI Perjuangan sebagai calon walikota Solo, maka dapat digambarkan ke empat tindakan tersebut sesuai dengan hasil penelitian, sebagai berikut:



Gambar 2. Komunikasi Gibran Rakabuming Raka

Penelitian dengan fokus komunikasi politik Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bagaimana interaksi politik Gibran Rakabuming Raka dalam membangun konsensus dengan DPP PDI Perjuangan. Konsolidasi politik melalui konsultasi menghasilkan rekomendasi DPP PDI Perjuangan sebagai calon wali kota Solo. Rekomendasi yang diperoleh Gibran Rakabuming Raka dianalisis melalui tindakan komunikatif.

Tindakan Teologis. Pada bagian ini Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi politik kepada PDI Perjuangan baik pada tingkat DPC Solo, DPD Jawa Tengah maupun Dewan Pimpinan Pusat. Hal ini menjadi proses yang penting guna mendapatkan rekomendasi sebagai calon wali kota Solo 2020. Tahap tindakan ini merupakan langkah awal yang harus dilalui untuk meraih tujuan politik. Jürgen Habermas dalam (Fitriyah et al., 2019) menyatakan tindakan teologis mengoreintasikan diri dan pada tujuan dari setiap keputusan dengan memanfaatkan sarana secara tepat. Tindakan ini bergerak dengan model bawah menuju ke atas yang kemudian diperluas menjadi model tindakan strategis dengan argumen bahwa proses pemanfaatan sarana dan langkah-langkah yang tepat tersebut diambil untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Gibran Rakabuming Raka dalam memperoleh rekomendasi PDI Perjuangan bertentangan dengan tindakan teologis menurut pandangan Jürgen Habermas dalam (Fitriyah et al., 2019) yakni sebagai berikut:

1. Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kantor DPC PDI Perjuangan Solo untuk mendaftarkan diri sebagai anggota partai dan calon walikota Solo di DPC PDIP Solo. Kehadiran Gibran di DPC PDIP Solo menimbulkan dinamika politik. Pasalnya DPC PDIP Solo telah memiliki calon yakni Achmad Purnomo.
2. Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan komunikasi berjenjang dengan mengedepankan kekuatan politis. Komunikasi berjenjang di tingkat DPD dan DPP tersebut menguntungkan Gibran Rakabuming Raka dibandingkan Achmad Purnomo.
3. Secara sistematis metodis Gibran Rakabuming Raka menggunakan kekuatan elit sehingga tidak

- memberikan ruang bagi DPC PDIP Solo yang telah merekomendasi Achmad Purnomo. Secara Peraturan Partai No. 24/2017 bahwasanya DPC yang memperoleh suara minimal 25% berhak merekomendasikan calon untuk maju pada pilkada selanjutnya.
4. Kekuatan politik Gibran Rakabuming Raka ditingkat DPD dan DPP juga dibuktikan dengan mendaftar calon walikota Solo di DPD PDIP Jawa Tengah setelah bertemu Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut dinilai syarat kepentingan di elit PDI Perjuangan terutama di tingkat DPP sehingga komunikasi ditingkat DPC tidak maksimal, bahkan koordinasi pencalonan di DPD Jawa Tengah tidak diketahui oleh Ketua DPC PDIP Solo, F.X. Hadi Rudyatmo
 5. Dalam hal bahasa yang digunakan Gibran Rakabuming Raka cenderung singkat dan terkesan sombong.
 6. Tindakan yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka melangkahi aturan atau prosedur yang tertuang dalam peraturan partai misalnya keanggotaan minimal 3 tahun untuk dapat dicalonkan.
 7. Gibran Rakabuming Raka dalam meraih kepentingannya selalu mengandalkan komunikasi atau konsultasi DPP sehingga komunikasi dan konsensus dari bawah ke atas serta komunikasi dengan Achmad Purnomo tidak berjalan.

Tindakan Normative. Dalam tindakan normative, Gibran Rakabuming Raka menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada di internal PDI Perjuangan. Tindakan ini dilakukan Gibran Rakabuming Raka, guna mengikuti rekrutmen yang diadakan oleh PDI Perjuangan. Oleh karena itu, dalam komunikasi politik yang dijalani oleh Gibran Rakabuming Raka harusnya dapat disesuaikan dengan agenda pencalonan yang ada di PDI Perjuangan. Keadaan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Jürgen Habermas (Fitriyah et al., 2019) bahwa tindakan normative, bergerak dengan model dari atas ke bawah dengan aktor diharapkan berperilaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan mengorientasikan tindakannya kepada nilai-nilai bersama. Konteks normatif menjadi dasar interaksi dalam totalitas relasi antar pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa PDI Perjuangan dalam memberikan rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka bertentangan dengan tindakan normative menurut pandangan Jürgen Habermas dalam (Fitriyah et al., 2019) yakni sebagai berikut:

1. Gibran Rakabuming Raka mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan dalam proses rekrutmen atau kandidasi. Namun terjadi benturan dimana secara peraturan partai menyebutkan bahwa keanggotaan minimal 3 tahun untuk dapat dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Persoalan ini menimbulkan konsensus yang dibangun adalah konsensus untuk kepentingan sepihak.
2. DPP PDI Perjuangan melakukan pelanggaran dalam menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota karena bertentangan dengan peraturan partai yang mana memberikan kesempatan bagi DPC yang memiliki suara pemilu minimal 25% untuk melakukan rekrutmen dan penjurangan tertutup calon kepala daerah.
3. DPP PDI Perjuangan tidak memberikan ruang diskusi yang terbuka bagi DPC PDIP Solo dan Achmad Purnomo setelah masuknya Gibran Rakabuming Raka dalam bursa pencalonan, sehingga rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka tidak merepresentasikan PDI Perjuangan sebagai partai kader.
4. PDI Perjuangan memberikan ruang yang sangat terbuka bagi Gibran Rakabuming Raka ketimbang Achmad Purnomo. Bahkan secara terbuka Presiden Joko Widodo memanggil Achmad Purnomo ke Istana Bogor dan menawari jabatan sebagai imbalan bahwa PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota Solo.
5. PDI Perjuangan memainkan kepentingan elitis dengan memberikan rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut dibuktikan dengan pertemuan khusus Gibran Rakabuming Raka dan Megawati Soekarnoputri.
6. Tindakan yang diambil PDI Perjuangan sebagai tindakan yang tidak demokratis dengan memperlakukan Achmad Purnomo sebagai objek sehingga tidak terjadi komunikasi dialogis yang berujung pada konsensus. Keputusan yang diambil DPP PDI Perjuangan bersifat sepihak dengan pola komunikasi politik monologis.

Tindakan Dramaturgis. Gibran Rakabuming Raka dalam melakukan tindakan dramaturgis mempersepsikan dirinya sebagai generasi muda dalam politik. Dalam tindakan ini Gibran Rakabuming Raka mendapatkan modal sosial yang besar dikarenakan anak presiden. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya popularitas yang diperoleh Gibran Rakabuming Raka dalam hasil sebuah survey yang

dilakukan oleh Universitas Slamet Riyadi, Solo. Dalam tindakan dramaturgi, tindakan sosial aktor diartikan sebagai perjumpaan partisipan dalam membentuk sesuatu yang bersifat publik yang dapat diperlihatkan dan saling ditampilkan. Posisi ini tentu memberikan ruang yang luas bagi Gibran Rakabuming Raka sebagai anak presiden, walaupun tergolong baru di politik dan dinilai minim pengalaman dibandingkan dengan Achmad Purnomo.

Pandangan Jürgen Habermas dalam (Fitriyah et al., 2019) bahwa aktor mengungkapkan citra tertentu untuk membangun kesan tentang dirinya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Gibran Rakabuming Raka dalam tindakan dramaturgis yakni sebagai berikut:

1. Komunikasi politik yang dibangun oleh Gibran Rakabuming Raka dengan PDI Perjuangan memperlihatkan sebuah keyakinan penuh dengan menyatakan keseriusannya untuk maju sebagai calon wali kota Solo tahun 2020 dari PDI Perjuangan.
2. Dalam komunikasi politik, Gibran Rakabuming Raka cenderung mengedepankan pendekatan elitis dengan DPP PDI Perjuangan sehingga mampu menaikkan popularitas dirinya dengan persepsi anak presiden.
3. Bahasa yang digunakan Gibran Rakabuming Raka cenderung singkat dan terkesan sombong misalnya pernyataan Gibran terkait lawan politik di Pilkada Solo yakni “siapa pun musuhnya, saya siap tempur”
4. Citra milenial yang dimainkan Gibran Rakabuming Raka secara segmentasi dapat meraup pemilih milenial. Hal tersebut juga ditandai dengan survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey, dimana Gibran Rakabuming Raka mendapatkan popularitas yang tinggi.
5. Citra anak presiden, memberikan ruang yang luas bagi Gibran untuk mendapatkan dukungan politik yang besar terutama PDI Perjuangan dan partai koalisi pengusung Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo tahun 2020.

Tindakan Komunikatif. Tindakan berikut yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka adalah tindakan komunikatif. Dalam tindakan komunikatif, bahasa menjadi kunci bagi terciptanya konsensus. Tindakan komunikatif mengarah pada interaksi dua orang subjek atau lebih dalam berbicara, bertindak dengan tujuan membangun hubungan antar personal. Tujuan yang hendak dicapai adalah kesepakatan. Pada model tindakan komunikatif menurut Jürgen Habermas dalam (Fitriyah et al., 2019), penulis mengambil tiga hal yaitu: Masalah Koordinasi Tindakan. Gibran Rakabuming Raka sebelum melakukan tindakan komunikatif membekali dirinya dengan pola komunikasi yang efektif guna tercapainya pemahaman secara timbal balik dan saling mempengaruhi.

Ilokusioner dan Perlokusioner yang mempunyai orientasi kepada keberhasilan dan orientasi kepada tercapainya pemahaman. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka menggunakan strategi komunikasi politik yang intens kepada DPP PDI Perjuangan. Selain itu modal politik yang dimiliki Gibran Rakabuming Raka sebagai anak presiden menunjang keberhasilan dalam mempengaruhi keputusan DPP PDI Perjuangan. Peran Klaim Validitas. Gibran Rakabuming Raka dalam tindakan komunikatif memenuhi klaim komprehensibilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan surat rekomendasi yang diberikan oleh DPP PDI Perjuangan sebagai calon wali kota Solo tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Gibran Rakabuming Raka dalam tindakan komunikatif menurut Jürgen Habermas (Fitriyah et al., 2019) yakni sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka adalah memperjuangkan keputusan DPP PDI Perjuangan sebagai calon yang direkomendasikan. Tindakan tersebut ditandai dengan membangun komunikasi yang intens dengan PDI Perjuangan terutama di tingkat DPP PDI Perjuangan.
2. Tindakan komunikatif yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka cenderung mengandalkan kekutan elit politik DPP PDI Perjuangan sehingga komunikasi politik yang dibangun tidak menunjukkan communication rational action sesuai dengan pandangan Jürgen Habermas tetapi lebih kepada purposive rational action.
3. Secara ungkapan ataupun bahasa yang digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka bersifat intersubjektif dengan elit DPP PDI Perjuangan namun tidak terhadap DPC PDIP Solo, sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dibangun menggunakan pendekatan elitis bukan komunikasi dengan konsensus yang dibangun secara berjenjang.
4. Tindakan komunikasi yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka syarat akan kepentingan. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa DPP PDI Perjuangan yang menentukan pencalonan sehingga komunikasi yang dibangun tidak melalui mekanisme keputusan berjenjang dari tingkat DPC PDIP

Solo.

PENUTUP

Keberhasilan komunikasi politik Gibran Rakabuming Raka dalam memperjuangkan keputusan DPP PDI Perjuangan dibuktikan dengan Surat Undangan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Nomor 316/IN/DPD/VII/2020 yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka direkomendasi untuk menjadi calon wali kota Solo tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara garis besar komunikasi politik Gibran Rakabuming Raka dalam memperjuangkan keputusan DPP PDI Perjuangan (analisis perspektif teori Jurgen Habermas), dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi politik yang bangun Gibran Rakabuming Raka cenderung elitis di tingkat DPP PDI Perjuangan, sehingga mengabaikan komunikasi di tingkat DPC PDIP Solo
2. Konsensus dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka syarat akan kepentingan DPP PDI Perjuangan. Komunikasi yang intens terjalin antara DPP PDI Perjuangan dengan Gibran Rakabuming Raka dibandingkan dengan DPC PDIP Solo dan Achmad Purnomo.
3. Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan pola komunikasi atas ke bawah melalui konsultasi dengan DPP PDI Perjuangan. Hal tersebut menguntungkan Gibran Rakabuming Raka dikarenakan DPP PDI Perjuangan selalu memainkan komunikasi yang bersifat monologis kepada DPC PDIP Solo dan Achmad Purnomo.
4. Citra milenial dan anak presiden menjadi daya tarik DPP PDI Perjuangan. Hal tersebut ditandai dengan keanggotaan baru Gibran Rakabuming Raka, mendaftar calon walikota Solo melalui DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, dan hilangnya peluang Achmad Purnomo hasil rekrutmen dan penjangkaran tertutup DPC PDIP Solo.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhidayah, A. Y. (2020). Strategi Komunikasi Politik Rohidin Mersyah sebagai Calon Petahana Pilkada 2020 Provinsi Bengkulu. *Jurnal Komunikasi Dan Budaya*, 01, 18–23. <http://journal.unbara.ac.id/>
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi (Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Daryono, A. (2016). *Tindakan Komunikatif pada Ritual Keagamaan (Analisis Kualitatif pada Ritual Waqiah di Desa Doropayung, Juwana, Pati, Jawa Tengah)* [Universitas Islam Negeri Yogyakarta]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/>
- Dewi, K. H., Kusumaningtyas, A. N., Ekawati, E., & Soebhan, S. R. (2018). Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 267–288. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/>
- Fitriyah. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://ejournal.undip.ac.id/>
- Fitriyah, N., Sarwoprasodjo, S., Sjaf, S., & Soetarto, E. (2019). Interaksi Politik Jawara dalam Pembangunan Perspektif Tindakan Komunikatif. *Jurnal Warta ISKI*, 2(02), 104–116. <https://doi.org/10.25008/>
- Nimmo, D. (2000). *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)*. Bandung: Remadja Posdakarya.
- Nugroho, E. (2019). Teoritisasi Komunikasi Dalam Tradisi Sosiokultural. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 236–253.
- Perjuangan, P. (n.d.). Portal Resmi PDI Perjuangan. [Pdiperjuangan.Id](http://pdiperjuangan.id). Retrieved September 11, 2021, from www.pdiperjuangan.id
- Putri, B. U., & Wibowo, E. A. (2020, July 18). PDIP Pilih Gibran, Purnomo: Ini Realitas Politik Saya Terima. *Tempo.Co*, 1. <https://nasional.tempo.co/>
- Rizal, J. G., & Hardiyanto, S. (2020, July 18). Saat Majunya Gibran Bisa Timbulkan Kecemburuan Kader Partai. *Kompas.Com*, 1. <https://www.kompas.com/>
- Rizka, N. M., & Syam, H. M. (2018). Pola Komunikasi Politik Illiza Sa'aduddin Jamal Menjelang Pilkada Serentak Aceh Tahun 2017 (Penelitian terhadap Dukungan Pencalonan dari Partai Politik). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(3), 1–14. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/>
- Santi, F. (2018). Pesan Nonverbal dalam Komunikasi Politik Wahidin Halim Sebagai Calon Gubernur Banten pada Pilkada Banten 2017. *Journal of Communication*, 2(2), 131–149.

- <http://jurnal.umt.ac.id/>
- Savirani, A. (2007). Dilema Para Politisi di Tingkat Lokal: Antara Mimpi Inovasi dan Demokrasi (Kajian tentang Dilema Politisi Eksekutif di Kabupaten Bantul dan Jembrana). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 93–118. <https://jurnal.ugm.ac.id/>
- Setyowati, Y. (2016). Tindakan Komunikatif Masyarakat “Kampung Preman” dalam Proses Pemberdayaan. *Jurnal ASPIKOM*, 3(1), 16. <http://jurnalaspikom.org/>
- Severin, W. J., & Tankard, J. W. (2011). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa* (5th ed.). Jakarta: Kencana.
- Sulaeman, A. (2015). Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 12–24. <http://jurnal.unpad.ac.id/>
- Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik (D. Herfan & A. Fajar (eds.)). Jakarta: PT Grasindo.
- Tobing, M. M. (2017). Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia. *Jurnal FISIP Universitas Kristen Indonesia*, 31. <http://repository.uki.ac.id/>
- Varma, S. P. (2007). *Teori Politik Modern* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.